Oktarini Khamilah Siregar

KEBIJAKAN FISKAL & FERTILITAS DI INDONESIA

KEBIJAKAN FISKAL DAN FERTILITAS DI INDONESIA

OKTARINI KHAMILAH SIREGAR

pena persada

PENERBIT CV. PENA PERSADA

**KEBIJAKAN FISKAL DAN FERTILITAS
DI INDONESIA**

Penulis:

Oktarini Khamilah Siregar

ISBN : 978-623-455-007-8

Editor:

Wiwit Kurniawan

Design Cover:

Retnani Nur Brilliant

Layout:

Nisa Falahia

Penerbit CV. Pena Persada

Redaksi:

Jl. Gerilya No. 292 Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas
Jawa Tengah

Email: penerbit.penapersada@gmail.com

Website: penapersada.com Phone: (0281) 7771388

Anggota IKAPI

All right reserved

Cetakan pertama: 2022

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang
memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa
izin penerbit

KATA PENGANTAR

Segala puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Swt, atas segala rahmat dan karunianya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku yang berjudul “**KEBIJAKAN FISKAL DAN FERTILITAS DI INDONESIA**”. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengatur kondisi ekonomi negara/daerah melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Berdasarkan teori ricardian ekuivalen, kebijakan fiskal tidak memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian nasional, karena adanya perilaku rasional konsumen tetapi teori keynesian mengatakan kebijakan fiskal memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian.

Dalam buku ini membahas mengenai faktor pengaruh kebijakan fiskal dalam keputusan fertilitas pada Pemerintah Kota dan Kabupaten di Indonesia selama siklus bisnis. Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan.

Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata saya berharap Allah Swt berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kebijakan Fiskal	1
B. Pertumbuhan Ekonomi	5
BAB II FLUKTUASI SIKLUS BISNIS	11
A. Kebijakan Fiskal dan Fertilitas	11
B. Signifikan Kebijakan Fiskal.....	14
C. Tingkat Fertilitas	19
D. Ekonomi Makro.....	22
BAB III PENGARUH KEBIJAKAN FISKAL	28
A. Pendapatan Rumah Tangga	28
B. Sektor Perusahaan.....	31
C. Sektor Pemerintah.....	31
BAB IV PERKEMBANGAN KEBIJAKAN FISKAL DAN FERTILITAS.....	37
A. Perkembangan Fertilitas di Indonesia.....	37
B. Perkembangan Kebijakan Fiskal di Indonesia	40
C. Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten dan Kota	43
D. Pengeluaran Daerah Pemerintah Kabupaten dan Kota	45
E. Utang Daerah Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota	47
BAB V SUMBER DAYA MANUSIA	50
A. Perkembangan Angka Harapan Hidup	50
B. Perkembangan Pendidikan.....	52
C. Perkembangan Penduduk	54
D. Perkembangan Inflasi.....	57
BAB VI SISTEM PERPAJAKAN	60
A. Rasio Pajak	60
B. Kebijakan Fiskal dan TFR di Indonesia.....	63
C. Implikasi Kebijakan	65
BAB VII PENUTUP	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam mendukung percepatan pembangunan ekonomi. Disisi lain, stimulus fiskal sebagai kebijakan *counter cyclical* untuk mengembalikan kestabilan perekonomian yang sedang mengalami resesi/krisis. Penggunaan kebijakan fiskal didasari oleh kemampuan instrumen kebijakan fiskal dalam mempengaruhi aktivitas perekonomian, baik untuk mendorong peningkatan output perekonomian maupun untuk meningkatkan kesejahteraan (Wardhana dan Hartono, 2012).

Teori ekonomi mendefinisikan kebijakan fiskal ekspansif sebagai peningkatan subsidi pemerintah. Dengan kenaikan subsidi pemerintah menyebabkan pengeluaran pemerintah meningkat, sehingga mampu mendorong naiknya tingkat investasi (Romer, 2001). Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah berupa pajak. Dalam keadaan krisis dan kelesuan sektor riil, sumber dana yang diperoleh dari pajak masih kurang, pengambilan utang yang terlalu besar akan mendorong peningkatan biaya bunga dan beban utang di masa depan (Ma'ruf, 2008). Secara umum kebijakan fiskal yang diterapkan di Indonesia sebagai negara berkembang adalah kebijakan yang ekspansif dengan menggunakan instrumen anggaran defisit (Abimanyu, 2011).

Perbedaan dampak ekonomi yang ada pada kebijakan fiskal masih menjadi perdebatan diantara para peneliti. Kelompok pertama berpendapat kebijakan fiskal dalam pemotongan pajak yang didanai oleh utang dapat meningkatkan pengeluaran konsumen dan mengurangi tabungan nasional. Peningkatan pengeluaran konsumen menyebabkan permintaan agregat lebih besar dan pendapatan

lebih tinggi dalam jangka pendek, akibatnya persediaan modal lebih kecil dan pendapatan lebih rendah dalam jangka panjang. Kelompok kedua adalah pandangan Ricardian, pemotongan pajak yang didanai oleh utang tidak mendorong pengeluaran konsumen karena sumber daya konsumen secara menyeluruh tidak meningkat. Implikasinya, utang pemerintah saat ini dianggap sama dengan pendapatan pajak di masa akan datang. Masyarakat yang berpikir rasional, mengetahui pajak masa depan sama dengan pajak saat ini. Oleh karena itu, masyarakat dapat menabung untuk membayar pajak masa depan, sehingga pemotongan pajak memicu kontraksi fiskal saat ini dan tidak akan mempengaruhi konsumsi karena masyarakat telah memprediksi akan terjadi ekspansi fiskal di masa depan (Swasono dan Martawardaya, 2015). Kemudian apabila kebijakan pemerintah tidak berhasil dalam meningkatkan pendapatan dalam membayar utang. Maka pemerintah segera mengambil kebijakan dengan cara menstabilkan rasio utang agar terhindar dari defisit fiskal. Untuk menstabilkan rasio utang terhadap PDB dengan menerapkan kenaikan tarif pajak, sehingga kenaikan pendapatan pajak membuat kebijakan fiskal berkelanjutan. Sama halnya dengan pendapat Barro (1974) bahwa pajak dan utang pemerintah memiliki efek yang sama dalam perekonomian dimana utang pemerintah cenderung meningkatkan pajak di masa depan yang merupakan asumsi penyebab terjadinya efek *Ricardian Equivalence*.

Asumsi *Ricardian Equivalence* secara umum terjadi di negara maju, tetapi *Ricardian Equivalence* dapat terjadi pada negara berkembang, berdasarkan penelitian Giorgino dan Holden (2003) *Ricardian Equivalence* terjadi pada negara berkembang karena negara tersebut memiliki utang yang tinggi. Temuan Giorgino dan Holden menyimpulkan bahwa *Ricardian Equivalence* terjadi pada 10 negara berkembang yaitu Burundi, El Salvador, Ethiopia, Honduras, India, Maroko, Nigeria, Pakistan, Sri Lanka dan Zimbabwe. Kemudian Ningrum (2019) menyatakan bahwa utang luar negeri yang dilakukan pemerintah dalam jangka panjang akan berdampak

netral terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia apabila pembiayaan utang luar negeri digunakan untuk mendanai Investasi yang produktif untuk perekonomian, sesuai dengan pandangan *Ricardian Equivalence*. Sejalan dengan Hakim (2006) membuktikan konsep *ricardian equivalence* bahwa utang luar negeri berpengaruh terhadap ekonomi makro di Indonesia sehingga kebijakan fiskal masih sangat berperan sebagai alat menstimulasi pertumbuhan perekonomian nasional.

Pengelolaan kebijakan fiskal ekspansif yang baik akan berdampak pada perekonomian nasional maupun kesejahteraan suatu daerah. Dengan bukti empiris faktor kebijakan fiskal yaitu rasio utang nasional/PDB, rasio defisit anggaran pemerintah/PDB, rasio pendapatan pajak/PDB dan rasio pengeluaran pemerintah/PDB memiliki efek dalam keputusan fertilitas selama masa siklus bisnis (Zaid, 2013). Sejalan dengan Karimi (1995) melalui peningkatan pengeluaran pemerintah dapat menurunkan jumlah anak dalam rumah tangga, menyebabkan anggaran defisit pada masa sekarang, dan menjadikan beban pajak di masa depan. Dan untuk mengeksplorasikan efek dari variabel ekonomi makro terhadap keputusan fertilitas dan menguji hasil empiris studi ini apakah bisa berlaku untuk negara maju lainnya. Dalam kebijakan ekspansif, rumah tangga merasa tidak bertanggung jawab untuk meningkatkan permintaan anak selama periode utang atau defisit nasional meningkat dengan bentuk pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi atau pajak yang rendah, sehingga anak-anak mereka tidak perlu membayar utang mereka di masa depan dalam jangka pendek.

Dengan kebijakan pemerintah daerah melalui peningkatan pengeluaran daerah dan penurunan pajak menyebabkan pendapatan rumah tangga meningkat. Partisipasi angkatan kerja wanita yang menikah mempengaruhi pendapatan bersih rumah tangga dan berdampak pada aturan fiskal (Rosaria, 2013). Pemerintah perlu melakukan peningkatan subsidi perawatan anak melalui pajak lump sum, meningkatkan tenaga kerja wanita melalui

pendidikan tinggi, akan menyebabkan pengurangan dalam biaya fiskal seperti pengeluaran pemerintah (Haan, 2009; Fanti, 2004).

Di negara Jepang dan Eropa melakukan simulasi menurunkan fertilitas melalui pengeluaran pemerintah khusus untuk anak, melebihi biaya fiskal jangka panjang dengan cara kenaikan tarif pajak, tetapi sistem fiskal sangat berbeda di seluruh negara (Doi, 2011; Fehr, 2008; Guest and McDonald, 2000). Becker (1960) berpendapat dengan meningkatkan pendapatan berarti mengarahkan pada peningkatan kuantitas dan kualitas anak, meskipun elastisitas kuantitas anak lebih kecil dibandingkan elastisitas kualitas anak. Sama halnya Mincer (1963), Becker dan Lewis (1973) menunjukkan bagaimana fertilitas dipengaruhi dalam pendapatan pria dan wanita. Dengan menurunnya pendapatan laki-laki mengarah ke permintaan yang lebih rendah untuk memiliki anak (efek pendapatan) sementara pendapatan perempuan menurun sehingga memiliki efek ambigu yang disebabkan efek pendapatan bertentangan dengan efek substitusi dalam permintaan anak.

Literatur sebelumnya meneliti efek fertilitas pada aktivitas ekonomi yaitu pada pertumbuhan ekonomi dan jumlah tenaga kerja wanita. Galor and Weil (1996) menyajikan model umpan balik positif dari fertilitas rendah ke output per kapita lebih tinggi, upah perempuan relatif lebih tinggi dan tingkat partisipasi perempuan relatif lebih tinggi dalam angkatan kerja sehingga fertilitas menjadi rendah. Oleh sebab itu, peneliti menyarankan efek umpan balik antara kegiatan ekonomi dan fertilitas. Jones (2011) menemukan kemampuan teori fertilitas menjelaskan bahwa hubungan fertilitas dan pendapatan tidak memiliki hubungan yang kuat. Beberapa studi empiris menyatakan negara yang memiliki produk domestik bruto tinggi maka fertilitasnya rendah dan sebaliknya produk domestik bruto rendah maka fertilitasnya tinggi, berbeda untuk beberapa kelompok negara di seluruh dunia disebabkan oleh aktivitas ekonominya (Mankiw, 1992; Hall dan

Jones, 1999; Palivos, 1995; Jones dan Tertilt, 2006; Cervellati, 2016).

B. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian yang rendah bisa disebabkan oleh rasio ketergantungan, karena penduduk usia non produktif lebih tinggi dibandingkan penduduk produktif dan berdampak terhadap defisit fiskal. Kemudian ketidakseimbangan jumlah penduduk wanita dan laki-laki akan berakibat pada penurunan fertilitas (Rajagukguk, 2010). Sejalan dengan (Ashraf, 2013) pengurangan fertilitas sebagai faktor penting dalam kontribusi terhadap pembangunan ekonomi. Lambatnya pertumbuhan ekonomi di Cina akibat ledakan jumlah penduduk, karena wanita harus menghabiskan usia produktifnya untuk mengandung, melahirkan dan merawat bayi yang menyebabkan kesulitan menghasilkan output ekonomi. Penduduk non produktif cenderung memiliki pengeluaran lebih besar untuk masalah kesehatan, sehingga pengeluaran semakin membengkak dan menyebabkan defisit fiskal yang serius bagi negara. Di negara Cina berhasil menggunakan kebijakan *one child policy* dengan menurunkan fertilitas di Cina secara terus menerus, tentunya akan semakin mendorong peningkatan pertumbuhan penduduk usia tua di Cina. (Zhao, 2011; Campbell, 2007; Fyustiazari, 2014; Yang dan Wang, 2011; Feng, 2005).

Berbeda dengan Blackorby (2005), menilai dampak ekonomi dari kebijakan satu anak bukan merupakan dampak kesejahteraan. Keluarga dapat memiliki anak tambahan, karena anak dapat meningkatkan utilitas orang tua, bahkan jika itu dapat menurunkan pendapatan per kapita dan keadaan ekonomi. Sehingga keputusan memiliki anak tergantung pada kondisi ekonomi pasangan rumah tangga (Benoit, 2015; Oguro, 2011). Perserikatan Bangsa-Bangsa memproyeksikan jumlah penduduk akan mencapai lebih dari 9,2 miliar pada tahun 2050. Penduduk dunia bertambah lebih 75% orang setiap tahunnya. Hampir semua pertambahan penduduk netto ini 97% terjadi di

negara berkembang. Masalah pertumbuhan penduduk bukan sekedar persoalan angka tetapi berkaitan dengan masalah kesejahteraan dan pembangunan manusia (Todaro, 2006).

Hasil laporan *state of world population (2018)*, negara maju di Asia, Eropa dan Amerika Utara, memiliki fertilitas rendah dalam waktu yang lama. Mereka cenderung memiliki tingkat pendidikan dan pendapatan yang lebih tinggi serta mewujudkan hak-hak perempuan seperti hak reproduksi dasar. Untuk meringankan kekhawatiran pemerintah tentang populasi menua maka dilakukan pemotongan layanan kesehatan untuk mengurangi fertilitas (C, 2011). Indonesia harus mampu mendesain sistem anggaran dengan baik di tahun 2020, karena jumlah populasi tahun 2000 di Indonesia di usia 55 tahun hingga 60 tahun sebanyak 10 dan 7 persen (BKKBN, 2018). Sehingga pemerintah harus dapat mengatasi masalah anggaran akibat meledaknya pengeluaran pemerintah karena kepadatan penduduk. Pentingnya pengelolaan kebijakan fiskal yang tepat dengan tujuan dalam meningkatkan perekonomian daerah. Kemudian peneliti melihat perkembangan kebijakan fiskal daerah pada pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia sesuai dengan masing-masing instrumen kebijakan fiskal daerah.

Perkembangan pengeluaran daerah masing-masing kabupaten dan kota di Indonesia mengalami kenaikan tetapi kenaikan tersebut tidak sebanding dengan peningkatan pendapatan daerah, sehingga pemerintah kabupaten dan kota untuk menutupi pengeluaran daerah akibat defisit pendapatan maka dengan cara melakukan utang antar daerah di kabupaten dan kota. Perkembangan kebijakan fiskal daerah pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia dapat dilihat pada lampiran pendapatan daerah, pengeluaran daerah, dan utang daerah. Anggaran defisit yang terus menerus dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan kota akan menyebabkan utang daerah semakin membengkak sehingga berdampak pada keberlanjutan fiskal yang tidak baik. Pemerintah kabupaten dan kota harus cepat dalam mengambil kebijakan untuk

mengatasi defisit fiskal yang berkelanjutan serta pemerintah tidak boleh tergantung kepada pajak masa depan dan utang dalam menutupi defisit fiskal tersebut. Peneliti sebelumnya mengatakan perekonomian yang baik akibat dari rendahnya fertilitas daerah tersebut dan sebaliknya dengan perekonomian yang buruk akibat dari tingginya fertilitas daerah tersebut. Kebijakan fiskal baik di pemerintah kabupaten dan kota serta Indonesia selalu mengalami utang yang tinggi akibat pendapatan defisit dengan fertilitas yang tinggi, sehingga pemerintah harus cepat mengatasinya karena akan berdampak pada perekonomian daerah dan nasional yang berkepanjangan.

Konsep ini sejalan dengan program pemerintah Indonesia akan menerapkan *Long-Term Growth Projection*, bekerja sama dengan Kementerian Keuangan Australia. *Long-Term Growth Projection* merupakan proyeksi kebijakan fiskal dengan menggunakan pendekatan kerangka 3P (*population, Participation, and Productivity*). Indonesia akan mengembangkan proyeksi ekonomi di bidang demografi untuk menyusun rencana anggaran kebijakan fiskal dengan tepat. Dari prinsip *population* mencakup fertilitas, migrasi dan proyeksi penduduk, sehingga pemerintah dapat mengatasi laju pertumbuhan penduduk yang setiap tahun meningkat (Purnomo, 2016). Kemudian dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.87 Tahun 2014 tentang sistem informasi keluarga untuk mewujudkan konsistensi kebijakan nasional, provinsi dan kabupaten/kota dengan tujuan meningkatkan upaya mengatur kelahiran anak, jarak, usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas.

Fertilitas merupakan jumlah anak yang lahir dalam keadaan hidup, untuk mengukur jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa usia subur (umur 15 - 49 tahun) menggunakan *total fertility rate* (TFR). Pemerintah Indonesia selalu menargetkan TFR berada pada angka 2,1 tetapi, hasil laporan sementara survei demografi dan

kesehatan Indonesia (SDKI) di tahun 2017 telah mengeluarkan TFR nasional pada angka 2,4. Prof. Murtiningsih Adioetomo mengatakan dalam acara Forum Pakar dan Pemangku Kepentingan Bonus Demografi, bagaimana TFR dengan angka sebesar 2,1 dan dampaknya terhadap fiskal. Perkembangan TFR antar Pemerintah Kabupaten dan Kota dapat dilihat dalam lampiran, pemerintah Kabupaten dan Kota yang memiliki nilai TFR 2,1 yang ditargetkan pemerintah pusat hanya 20% atau 88 Kabupaten dan Kota dan sisanya 80% atau 357 Kabupaten dan Kota yang memiliki nilai TFR diatas 2,1 sampai dengan 5,08 anak per 1000 wanita dari 445 Kabupaten dan Kota. Penyebab *Total Fertility Rate* di Indonesia belum tercapai disebabkan oleh masih banyaknya wilayah kabupaten dan kota yang ada di Indonesia nilai TFR masih tinggi.

Selanjutnya perkembangan penduduk dan TFR di Indonesia terdapat perbedaan teori dan empiris yang menunjukkan ada masalah yang harus diteliti. Dengan melihat trend penduduk Indonesia selama 1977-2017 pada gambar 4.11 mengalami peningkatan yang drastis tetapi trend TFR di Indonesia selama 1977-2017 pada gambar 4.1 mengalami penurunan. Teori ricardian ekuivalen mengatakan apabila perkembangan penduduk semakin meningkat maka TFR akan meningkat, tetapi yang terjadi di Indonesia malah perkembangan berlawanan arah, ini menunjukkan terjadi masalah dalam perkembangan penduduk dan TFR. Sehingga peneliti ingin melihat penyebab masalah perkembangan penduduk dan TFR apakah dari faktor kebijakan fiskal, angka harapan hidup, inflasi dan pendidikan. Oleh sebab itu, salah satu untuk mencapai TFR tersebut dengan kebijakan pemerintah yang lebih efektif dan efisien melalui kebijakan fiskal daerah, maka terbukti bahwa efek kebijakan fiskal dapat mempengaruhi dalam keputusan fertilitas.

Melalui kebijakan fiskal pemerintah melakukan peningkatan pengeluaran yang menyebabkan anggaran defisit karena pendapatan daerah tidak cukup menutupi pengeluaran pemerintah akibat tidak ada perubahan tarif pajak daerah.

Perilaku rumah tangga yang bermoral atau bertanggung jawab akan mengurangi konsumsi dan dialihkan ke tabungan untuk diwariskan ke anak cucunya. Rumah tangga akan lebih memprioritaskan kualitas anak dari pada kuantitas anak. Karena di masa depan pemerintah akan menaikkan tarif pajak untuk membayar utang pemerintah. Dengan sendirinya rumah tangga akan menurunkan permintaan anak, akibat kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah. Sehingga pemerintah tidak perlu lagi melakukan sosialisasi pengendalian jumlah anak, kasus ini apabila rumah tangga bersifat bertanggung jawab atau bermoral. Penelitian ini hanya difokuskan untuk melihat efek dari kebijakan fiskal terhadap fertilitas di Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Berdasarkan informasi tersebut, terlihat faktor kebijakan fiskal memiliki pengaruh terhadap fertilitas, namun pengaruh kebijakan ini berbeda antara satu negara dengan negara lain atau antara satu daerah ke daerah lain. Kebijakan fiskal di daerah dan nasional diharapkan memberikan stimulus dalam keputusan fertilitas secara berkesinambungan dan berkualitas. Pengelolaan kebijakan fiskal yang tepat akan terhindar dari masalah ekonomi dalam jangka panjang dan mempengaruhi pengendalian jumlah anak sesuai dengan kondisi perekonomian negara. Dari sisi lain, perekonomian negara dalam keadaan meningkat sehingga fertilitas akan menurun dan sebaliknya. Akan tetapi, belum ada peneliti yang melihat bagaimana faktor-faktor kebijakan fiskal mempengaruhi fertilitas di negara berkembang. Oleh sebab itu, melalui penelitian ini penulis tertarik menguji teori ricardian ekuivalen dalam kebijakan fiskal terhadap fertilitas pada pemerintah kabupaten dan kota serta di Indonesia. Penelitian ini penulis tuangkan dalam bentuk karya tulis disertasi dengan judul “Kebijakan Fiskal dan Fertilitas di Indonesia”.

Fertilitas dalam penelitian ini menggunakan *Total Fertility Rate* (TFR). Kebijakan fiskal daerah seperti pendapatan daerah, pengeluaran daerah, dan utang daerah, dan variabel kontrol terdiri dari angka harapan hidup, pendidikan,

penduduk dan inflasi pada pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia mempengaruhi fertilitas selama masa siklus.

BAB II

FLUKTUASI SIKLUS BISNIS

A. Kebijakan Fiskal dan Fertilitas

Kebijakan fiskal daerah diwujudkan dalam bentuk pemberian transfer kepada pemerintah daerah berupa dana perimbangan, dan otonomi khusus dan penyesuaian, serta dalam bentuk instrumen peningkatan potensi pendapatan daerah. Selain kedua kebijakan tersebut pemerintah pusat mengalokasikan anggaran kementerian dalam upaya pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantu (Basri, 2004; Mardiasmo, 2009; Akmad, 2012).

Kebijakan fiskal dipandang sebagai alat yang sangat ampuh dalam membantu memperkecil siklus bisnis. Mengingat sumber penyebab terjadinya fluktuasi ekonomi jangka pendek berasal dari guncangan permintaan agregat dan penawaran agregat maka usaha untuk mengendalikan fluktuasi siklus bisnis seharusnya dilakukan permintaan agregat dan penawaran agregat melalui berbagai instrumen kebijakan ekonomi makro seperti kebijakan fiskal yang tepat. Kebijakan ini mempengaruhi siklus bisnis sehingga sangat berpotensi menstabilkan perekonomian dari berbagai fluktuasi siklus bisnis jika dilaksanakan secara baik, tepat, akurat dan *prudent*. Sebaliknya kebijakan tersebut tidak dijalankan dan dikelola dengan baik, justru akan dapat menciptakan masalah baru pada ketidakpastian ekonomi yang bukan tidak mungkin bahkan akan lebih buruk lagi (Mankiw, 2007).

Fiskal daerah di kategori menjadi dua bagian yaitu pengeluaran dan pendapatan yang menghasilkan sumber pendapatan APBD. Di Indonesia, fiskal daerah untuk pengeluaran didanai melalui dana transfer ke daerah dengan tujuan agar daerah dapat membelanjakan dana sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Sementara fiskal daerah untuk pendapatan belum diterapkan secara nyata dimana pemerintah pusat masih menguasai basis pajak dalam jumlah

besar. Sementara pemerintah kabupaten/kota masih mengelola pajak dalam jumlah relatif kecil dikarenakan adanya pembatasan otonomi dari sisi pendapatan, sehingga peranan pendapatan asli daerah masih kecil dalam membiayai pengeluaran pemerintah daerah (Brodjonegoro, 2003).

Kebijakan fiskal sebagai alat yang efektif untuk mempengaruhi agregat makro dalam jangka panjang. Model pertumbuhan yang lebih baru telah menghidupkan kembali minat kebijakan fiskal sebagai instrumen yang efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan untuk memperbaiki hasil yang tidak diinginkan dari proses pertumbuhan ekonomi yang bias keterampilan dalam hal ketidaksetaraan. Teori-teori terbaru berfokus pada peran pendapatan dan ketidaksetaraan kekayaan dalam proses pertumbuhan ekonomi (Gallo, 2011).

Pertumbuhan ekonomi regional dipengaruhi oleh pajak pusat dan daerah, pengeluaran pemerintah, dana transfer antar pemerintah. Jika pemerintah daerah memiliki pendapatan yang cukup, maka transfer pusat dapat mengurangi laju pertumbuhan. Bahkan jika pendapatan daerah rendah, mengakibatkan kenaikan transfer pusat membuat laju pertumbuhan meningkat. Model ini berguna dalam melakukan pilihan antara kesejahteraan dan pertumbuhan memaksimalkan pajak, transfer, dan pengeluaran dalam konteks federalisme fiskal (Liutang, 1998)

Chimobi (2009) dan Thamae (2013) menemukan hubungan jangka panjang antara pendapatan nasional dan pengeluaran pemerintah baik di Nigeria dan Lesotho. Sedangkan E, Dogun (2006), menemukan hasil dari data Filipina bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pendapatan nasional. Perkembangan pengeluaran pemerintah akan meningkat disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. Udejaja (2015) memperoleh hasil penelitian di Nigeria bahwa pengeluaran untuk kesehatan memiliki efek negatif pada pertumbuhan ekonomi.

Pendapatan pajak berpengaruh negatif terhadap PDB, berarti peningkatan pendapatan pajak dapat menurunkan PDB disebabkan pendapatan pajak sebagai pengurang dari pembentukan pendapatan disposable. Sedangkan belanja negara berpengaruh positif terhadap PDB berarti belanja negara secara langsung dapat meningkatkan pertumbuhan PDB di Indonesia dikarenakan permintaan tenaga kerja meningkat maka upah riil akan naik. Rendahnya produktivitas tenaga kerja dilihat melalui kondisi pendidikan dan kesehatan di beberapa negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi sulit meningkat karena rendahnya produktivitas sehingga output yang dihasilkan tidak optimal. Tiongkok merupakan negara yang memiliki kuantitas tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Rini, 2015).

PDB digunakan sebagai salah satu patokan penentuan bagaimana keberhasilan sebuah negara dalam mengelola perekonomiannya. Malaysia dapat terhindar dari *Middle-income trap*, jika pemerintah mendukung pertumbuhan ekonomi yang berdasarkan ilmu pengetahuan (*knowledge-based economy*) Woo (2009). World Bank (2014), merekomendasikan 4 area kebijakan yang perlu diambil untuk meningkatkan pertumbuhan PDB di Indonesia adalah Pertama, meningkatkan pertumbuhan produktivitas dengan mengurangi perbedaan pemerataan pembangunan infrastruktur, keterampilan/keahlian, dan memperbaiki fungsi pasar. Kedua, pemerataan kesejahteraan yang lebih luas seperti meningkatkan kualitas pelayanan untuk semua kalangan atau secara inklusif; menguatkan perlindungan sosial, dan mengatur risiko bencana alam dan membangun ketahanan. Ketiga, Inisiatif pilihan pendanaan, dengan menginisiasi pembiayaan lainnya yang lebih strategis sangat dibutuhkan dalam peningkatan ekonomi. Seperti subsidi dialihkan ke pengembangan infrastruktur, perlindungan risiko kesehatan yang lebih besar bagi rakyat, serta bantuan sosial untuk para rakyat miskin. Dan Keempat, memperkuat implementasi seperti peran yang baik oleh pemerintah pusat, birokrasi yang akuntabel, pengelolaan

sumber daya manusia yang lebih strategis, perencanaan dan penganggaran yang lebih baik, dan akuntabilitas yang kuat dalam pelayanan di tingkat pelayanan daerah.

Kebijakan fiskal sebagai kebijakan anggaran (*budgetary policy*) yang dilakukan pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Claey (2008) menemukan dampak kebijakan fiskal tidak memiliki kendala dalam mempengaruhi ketidakstabilan ekonomi untuk meningkatkan pengeluaran dan menaikkan pajak di Swedia. Pengenaan pajak langsung yang beban pajaknya tidak dapat digeserkan akan mengurangi tingkat pendapatan yang siap dibelanjakan (*disposable income*) dan tentunya akan mengurangi konsumsi dan tabungan masyarakat. Turunnya konsumsi dan tabungan masyarakat ditentukan oleh tingginya hasrat konsumsi marginal (*marginal propensity to consume* = mpc) dan hasrat tabungan marginal (*marginal propensity to save* = mps) (Musgrave dan peggy, 1989).

B. Signifikan Kebijakan Fiskal

Allers (2010) menemukan perilaku saling ketergantungan fiskal antar pemerintah daerah yang dijelaskan melalui pengeluaran pemerintah dan pajak. Dengan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan lebih efektif dan mampu untuk memenuhi kebutuhan publik, membangun sarana perekonomian serta menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat tersebut.

Acemoglu (2007) dan Li (2007) berpendapat bahwa pertumbuhan populasi yang tinggi memiliki efek negatif dan signifikan terhadap PDB per kapita. Dalam Rajagukguk (2010) bahwa pertumbuhan ekonomi meningkat di masa lalu disebabkan pertumbuhan penduduk yang tinggi, meskipun program keluarga berencana (KB) digalakan di Indonesia. Tidak dipungkiri keluarga miskin cenderung memiliki jumlah anak yang banyak jika dibandingkan dengan keluarga non miskin, sehingga terjadinya fertilitas yang memiliki *gradien*

income. Orang yang pendapatannya lebih tinggi biasanya berpikir positif dalam memiliki anak yang lebih sedikit. Dampak kebijakan keluarga miskin sulit untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, dengan melihat kondisi ini akan berakibat pada ketimpangan masyarakat semakin tinggi. Masalah lain terjadi ketidakseimbangan jumlah penduduk wanita dan laki-laki akan berakibat pada penurunan fertilitas dan angka pertumbuhan penduduk yang mempengaruhi pola keadaan sosial, ekonomi dan keluarga. Pemerintah harus membuat kebijakan apabila terjadi rasio ketergantungan terhadap penduduk usia non produktif yang tinggi dibandingkan penduduk produktif, akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang rendah dan mengakibatkan defisit fiskal. Ashraf (2013) berpendapat mengurangi fertilitas sebagai faktor penting dalam kontribusi terhadap pembangunan ekonomi. Karena pengurangan fertilitas yang diberikan akan memiliki efek signifikan secara ekonomi pada pendapatan per kapita.

Zaid (2013) menemukan hasil penelitian adalah rasio pendapatan pajak /PDB dan rasio pengeluaran pemerintah /PDB memiliki hubungan yang positif terhadap total fertility rasio sedangkan rasio utang/PDB dan rasio defisit memiliki hubungan yang negatif terhadap total fertility rasio di Amerika dengan menggunakan VAR. Floden (2013) mengatakan kerangka fiskal baru memiliki kontribusi dalam memperkuat keuangan publik tetapi anggaran surplus dan pertumbuhan PDB yang tinggi menjelaskan sepertiga dari penurunan rasio utang publik. Karimi (1995) menemukan bahwa pengeluaran dan defisit pemerintah memiliki efek negatif terhadap fertilitas dalam ricardian ekuivalen hipotesis.

Doi, et al (2011) menemukan untuk menstabilkan rasio utang terhadap PDB di negara Jepang perlu menerapkan kenaikan tarif pajak, karena kenaikan pajak membuat kebijakan fiskal berkelanjutan. Kebijakan fiskal di Jepang bisa tidak berkelanjutan apabila tidak melakukan perubahan rezim seperti pemerintah gagal mengurangi defisit melalui